

Forum Diskusi Multipihak dan Forest Governance Learning Group Bungo

Oleh: Ratna Akiefnawati dan Iman Budisetiawan

“Mau ketemu pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan saja sulitnya bukan main, bagaimana mau membangun kehutanannya” begitulah ungkapan yang dilontarkan kawan-kawan LSM tentang Pemerintah Kabupaten Bungo.



Peserta pertemuan FGLG Internasional ke 6 di Bali, 1-4 Desember 2009.

Sebelum tahun 2005, kawan-kawan dari LSM sering mengeluh karena mengalami kesulitan menemui pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan ketika mereka ingin mengadakan diskusi untuk membahas program kehutanan. Keluhan serupa juga diungkapkan oleh kawan-kawan yang datang ke kantor Bappeda untuk mengetahui rencana pembangunan daerah.

Ternyata, kedua instansi yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan kehutanan di Kabupaten Bungo tersebut tidak ada yang bisa diajak bekerja sama dalam membahas program kehutanan maupun rencana pembangunan daerah

di Kabupaten Bungo. Namun, sekarang keadaan sudah berubah.

Sejak tahun 2005 geliat sektor kehutanan multipihak di Kabupaten Bungo mulai terlihat. Pemerintah kabupaten, masyarakat desa, LSM dan peneliti sudah merasa jenuh dengan peraturan-peraturan yang selalu berubah, dan program kerja yang hanya seperti paket kerja saja tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aktor-aktor yang bekerja pada sektor kehutanan di kabupaten ini merasa perlu untuk segera melakukan perubahan tatanan pengelolaan hutan menuju yang lebih baik.

Inisiatif awal untuk mengadakan pertemuan dan diskusi dilontarkan oleh Bapak Mustafal Hadi dan Bapak Iman, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) dan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Pak Mustafal dan Pak Iman merasa kebingungan dengan arah pembangunan masyarakat kehutanan (*Social Forestry*) yang ada saat itu.

Gayungpun bersambut. Pak Mustafal dan Pak Imam, ketika itu mendatangi kantor ICRAF di Muara Bungo untuk mencari informasi mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat dan kebetulan sekali, ICRAF telah mengembangkan program tersebut di daerah lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Sejak saat itu, mulailah diskusi mencair hingga mendapatkan cara bagaimana mengaktifkan masyarakat desa.

Saat itu pula, timbul ide untuk mengumpulkan kawan-kawan yang memiliki visi yang sama untuk mendiskusikan program yang sesuai dan menyentuh ke masyarakat. Maka berkumpul perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Bappeda, KKI-WARSI (LSM yang aktif melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan Suku Anak Dalam), ACM (Adaptive Collaborative Management, mitra kerja Yayasan Gita Buana/CIFOR/PSHK-ODA) dan ICRAF.

Pertemuan pertama diadakan awal bulan Januari 2005 di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mendiskusikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan

membahas kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Dishutbun serta membuat keputusan bersama untuk mengadakan diskusi informal setiap bulan.

Diskusi informal bulanan tersebut sifatnya dinamis, disesuaikan dengan topik dari masing-masing institusi yang bekerja di Kabupaten Bungo. Pada saat pertemuan keempat, yaitu saat ICRAF menjadi tuan rumah, lahirlah kesepakatan untuk mengubah status dari diskusi informal menjadi diskusi formal yang kemudian forum ini dinamakan "Forum Diskusi Multipihak Bungo".

Dalam perkembangannya, terjadi pasang-surut kegiatan, karena banyak proyek pembangunan dan pengembangan masyarakat desa yang berakhir pada tahun 2007, dan yang tertinggal hanya program pemerintah kabupaten dan ICRAF. Namun, aktor penggiat diskusi masih sering bertemu walaupun jumlahnya semakin mengecil. Strategi diskusipun dirubah, disesuaikan dengan program kerja dan lebih banyak berdiskusi melalui dunia maya (email). Semua aktor menuliskan kegiatannya di website untuk dijadikan perbandingan bagi daerah lain.

Program kerja yang sudah diselesaikan selama tahun 2009 adalah:

1. Aktif mendorong pengakuan pengelolaan hutan oleh masyarakat berupa hutan adat. Program ini telah menunjukkan hasil nyata, yaitu diakuinya Hutan Adat Senamat Ulu seluas 162 ha melalui SK Bupati Bungo
2. Aktif mendorong disahkannya Hutan Desa. Keberhasilan program ini telah terbukti dengan diakuinya Hutan Desa Lubuk Beringin seluas 2.356 ha oleh Menteri Kehutanan RI (MS. Kaban, waktu itu), sebagai hutan desa pertama di Indonesia
3. Meningkatkan sumberdaya manusia. Program ini dilakukan dengan mengirim anggota FDM/FGLG Bungo untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga memberikan dampak positif yang sangat pesat, seperti aktifnya anggota pada kegiatan di instansi/organisasinya masing-masing dalam penulisan maupun penyusunan rencana kegiatan. Setiap awal tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunanpun mensosialisasikan program kerja kepada mitra kerjanya
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bungo mempersiapkan

kelembagaan penerima dan pengelola dana REDD

5. Memfasilitasi replikasi hutan desa di sepanjang hutan lindung Bukit Panjang - Rantau Bayur seluas 13.529,40 ha yang berada di dua kecamatan. Saat ini surat pengajuan sedang diproses di kantor Bupati.
6. Aktif dalam diskusi FGLG Nasional dan Internasional. Areal kerja FGLG Internasional adalah Indonesia, Ghana, Mozambique, Uganda, Malawi, Cameroon, Tanzania, Afrika Selatan, India, dan Vietnam.

Publikasi seperti pada koran lokal Bungo dan Jambi, Nasional pada laporan-laporan FGLG Indonesia dan dalam <http://fglgbungo.web.id>

Tidak hanya keberhasilannya dalam menyelesaikan program kerja, melalui Forum Diskusi Multipihak Bungo, hingga akhir 2009, Kabupaten Bungo menjadi daerah tujuan studi pembelajaran pengelolaan kehutanan multipihak dan praktek-praktek pemberdayaan masyarakat kehutanan.



Suasana diskusi FGLG Indonesia untuk membuat "designing mainstreaming forest governance manual", dimana salah satu lokasi studinya adalah Kabupaten Bungo.